

Transpuan Dalam Dominasi Penindasan

Afifah Qurotul Ain¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
afifahqrtl@gmail.com

M. Dian Hikmawan²

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan
Ageng Tirtayasa
dian.hikmawan@untirta.ac.id

ABSTRACT

A structural position that is not profitable for transwomen groups, they are frequently marginalized, isolated, and rarely included in decision-making processes; this is one of the obstacles to the practice of democracy in Indonesia. The study of oppression is well-known and is frequently associated with the topic of vulnerable social groups. Sanggar Suara exists as a young transwomen group to empower its members and actively participate in networking with other community organizations in voicing issues (other than gender and minority issues) in society through demonstrations or social media campaigns, such as health issues, the environment, land grabbing, labor wages, and other injustices. By fostering an inclusive environment, they position themselves as members of society. Society will no longer look at transgender people through one lens and will be able to see the potential that exists within transwomen in the same way that they see the potential of others. The author employs the ideas of Iris Mrion Young, who classifies oppression into five faces: exploitation, marginalization, powerlessness, cultural imperialism, and violence. In the methodological aspect, this research uses a descriptive qualitative method with Van Manen's phenomenological approach to examine how the incident was captured by humans so that it becomes part of the experience and awareness of the transgender group which of course is associated with the five faces of oppression theory to identify what oppression is experienced by transwomen.

Keywords: *Transwomen, Oppression, Exploitation*

LATAR BELAKANG

Hasil demokrasi tidak secara penuh mampu merealisasikan kebutuhan dan keinginan semua pihak, sekalipun demokrasi diagungkan sebagai model terbaik karena menyertakan warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan dianggap dapat mengatasi ketidakadilan, hal tersebut tidak berarti bahwa secara praktik bebas dari cacat dan kritik. Salah satunya dijumpai oleh kelompok sosial rentan, yaitu kelompok transpuan. Kelompok transpuan sering terpinggirkan, terisolasi, dan jarang diikutsertakan dalam proses pengambilan keputusan akibat adanya posisi struktural yang tidak menguntungkan mereka, hal tersebut menjadi salah satu bentuk bagian dari hambatan dalam praktik demokrasi di Indonesia (Muhtmainnah, 2016).

Sebagai makhluk sosial, kelompok transpuan juga hidup dalam lingkup sosial dan berinteraksi dengan sesama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, faktanya sering kali ditemui isu-isu sosial dalam interaksi tersebut. Salah satu isu sosial tersebut adalah mengenai tentang terdapatnya penindasan yang terjadi kepada mereka (Subhrajit, 2014). Penindasan terjadi ketika individu secara sistematis mengalami degradasi politik, ekonomi, budaya, atau sosial karena hasil dari struktur dominasi dan subordinasi yang sesuai dengan ideologi superioritas dan inferioritas (Charlton, 1998).

Menurut Salim (2020), keberadaan transpuan yang merupakan bagian dari LGBT sangat ditentang oleh masyarakat karena berkaitan dengan orientasi seksual yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Stigma negatif yang menyertai keberadaan mereka membuat sebagian besar masyarakat Indonesia berasumsi bahwa LGBT adalah ancaman bagi masyarakat yang didominasi heteroseksual. Namun kelompok LGBT hingga kini berusaha untuk masuk ke tengah masyarakat dengan menjadi salah satu subkultur melalui media sosial. Berdasarkan survei data dari BBC dalam Salim (2020) yang telah dilakukan sebanyak 3 kali pada Maret 2016 dan Desember 2017 oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari BBC News Indonesia terkait konflik publik mengenai LGBT di Indonesia, kelompok LGBT dianggap sebagai ancaman meningkat oleh masyarakat. Hasil survei pada periode terakhir ialah sekitar 46,2% responden berpendapat bahwa LGBT cukup mengancam, sementara 41,4% lainnya menganggap sangat mengancam. Bahkan 41,1% responden dari kategori lainnya menilai bahwa kelompok LGBT tidak berhak untuk tinggal di Indonesia. Tidak sedikit masyarakat yang memberikan *hate comments* atau mencemooh baik secara langsung maupun secara tersembunyi dibalik gadget akibat dari perbedaan pemahaman dan penolakan dari masyarakat pada umumnya.

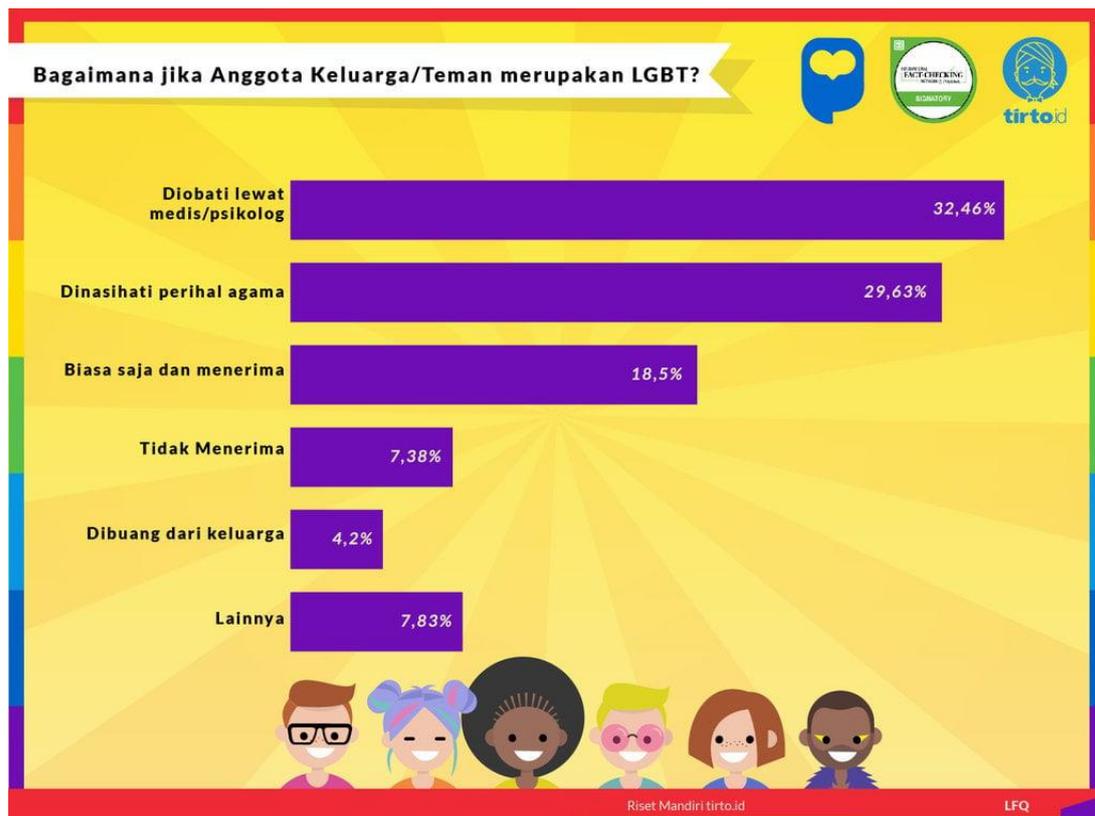
Gambar 1. Survey Stigma LGBT



Sumber: (Garnesia, 2019)

Tirto.id melakukan survei kepada masyarakat Indonesia sebanyak 1.005 responden mengenai pandangan terhadap LGBT pada 25-26 Juni 2019. Berdasarkan grafik di atas, masih banyak yang sangat setuju LGBT adalah perbuatan yang salah (55,72%) dan memerlukan perawatan medis/kesehatan (48,66%). Sedangkan hanya sebesar 11,14% masyarakat yang berpandangan bahwa LGBT memiliki hak untuk hidup di Indonesia dan hanya 6,27% masyarakat yang sangat setuju pemerintah harus melindungi hak-hak LGBT (Garnesia, 2019).

Gambar 2. Tanggapan Keluarga/Teman Tentang LGBT



Sumber: (Garnesia, 2019)

Tirto.id juga menanyakan pendapat masyarakat jika terdapat anggota keluarga atau kerabat LGBT. Sebanyak 32,46% masyarakat beranggapan bahwa LGBT merupakan suatu penyakit yang harus disembuhkan melalui pengobatan medis atau psikolog, hingga melalui keagamaan (29,63%) (Garnesia, 2019). Dari data survei tersebut membuktikan bahwa LGBT masih dianggap tabu dan merupakan suatu penyakit ataupun aib yang sulit diterima oleh masyarakat luas di Indonesia, oleh karena itu tidak jarang adanya penolakan yang dialami LGBT dari keluarga hingga kerabat dekat mereka.

Studi tentang penindasan telah banyak dikenal dan biasanya dihubungkan dengan topik kelompok sosial rentan. Menurut Iris Marion Young (2014), terdapat 5 wajah penindasan, yaitu eksploitasi (*exploitation*), marginalisasi (*marginalization*), ketidakberdayaan (*powerlessness*), imperialisme budaya (*cultural imperialism*), dan kekerasan (*violence*). Mengutip data dari Kementerian Sosial di tahun 2015, diperkirakan terdapat

38.000 populasi identitas LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia (Praptoraharjo, Nevendorff, Irwanto, & Puspoarum, 2017).

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan tentang *Five Faces of Oppression* oleh Iris Marion Young

Dalam pemahaman tradisional, penindasan berarti praktik tirani oleh kelompok penguasa. Namun, penindasan juga menciptakan ketidakadilan dalam situasi yang tidak disertai seorang tiran. Orang tidak selalu ditindas oleh tiran kejam dengan niatnya yang buruk (Prilleltensky & Gonick, 1996). Dalam banyak kasus, masyarakat liberal (menghargai hak-hak individualistik) yang berniat baik dapat menempatkan kendala di seluruh sistem pada kelompok dan membatasi kebebasan kelompok dimaksud. Lebih lanjut Prilleltensky dan Gonick (1996) mengatakan penindasan bisa menjadi hasil dari beberapa pilihan orang atau kebijakan yang menyebabkan tertanamnya norma, kebiasaan, dan simbol yang tidak dipertanyakan. Aturan-aturan sosial ini dapat menjadi struktur kekuatan dan penghalang yang membatasi, melumpuhkan bahkan mengurangi (secara literal maupun metaforis) beberapa kelompok orang (Harvey, 2010).

Terdapatnya penindasan tersebut menghambat atau mereduksi potensi orang lain untuk menjadi manusia sepenuhnya. Dengan kata lain, penindasan terjadi ketika orang atau kelompok tertentu membuat atau mengkondisikan orang atau kelompok lain menjadi kurang manusiawi – atau memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi (dehumanisasi). Membuat orang tidak berkembang sepenuhnya, berarti menghambat bahasa, pendidikan, dan peluang lain yang memungkinkan mereka untuk berkembang. Menurut Iris Marion Young (2004), terdapat lima “wajah” atau jenis penindasan, yaitu:

Tabel 1. Teori *Five Faces of Oppression*

<p>1. <i>Exploitation</i></p>	<p>Eksplorasi ditunjukkan dengan adanya tindakan menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan keuntungan tanpa memberi kompensasi yang adil kepada mereka.</p>
<p>2. <i>Marginalization</i></p>	<p>Marginalisasi merupakan tindakan mengasingkan atau membatasi sekelompok orang ke status sosial yang lebih rendah atau meminggirkan mereka dari masyarakat. Masyarakat yang termarginalisasi mampu diidentifikasi dengan rendahnya mutu pendidikan dan kesehatan, juga tingginya angka kemiskinan di suatu wilayah.</p>

<p>3. <i>Powerlessness</i></p>	<p>Bentuk ketidakberdayaan yang dimaksud Young tersebut terkait dengan teori sosialisme Marx: beberapa orang “memiliki” kekuasaan, sementara yang lain “tidak memiliki”.</p>
<p>4. <i>Culture Imperialism</i></p>	<p>Imperialisme budaya yang melibatkan praktik budaya kelas dominan dan menetapkannya sebagai norma. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat mengendalikan bagaimana orang-orang di masyarakat itu menafsirkan dan berkomunikasi. Di seluruh negara, gender dan seksualitas adalah contoh umum imperialisme budaya.</p>
<p>5. <i>Violence</i></p>	<p>Kekerasan mungkin merupakan bentuk penindasan yang paling jelas dan terlihat. Anggota dari beberapa kelompok rentan hidup dengan pengetahuan bahwa mereka harus takut akan serangan tanpa alasan terhadap orang atau properti mereka.</p>

Sumber: (Heldke, L., & O’Connor, P., 2004)

METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini lebih melihat dan mendengar lebih dekat serta terperinci bagaimana penjelasan serta pemahaman dari individu tentang pengalaman-pengalaman yang sedang dan telah dialaminya. Konteks dari kehadiran fenomena dalam penelitian kualitatif lebih mengendepankan kepada mencari, mempelajari, dan akhirnya mampu menyampaikan arti dari fenomena suatu peristiwa yang terjadi serta hubungannya antara orang-orang yang biasa dalam situasi tertentu (Manen, 2014). Tujuan dari fenomenologi sendiri adalah untuk mereduksi pengalaman individu pada fenomena menjadi deskripsi tentang suatu makna atau pemahaman yang khas dari sesuatu (Manen, 2014). Maka dari itu, “makna” menjadi sesuatu yang penting pada konsep fenomenologi karena makna tersebut timbul dari pengalaman serta kesadaran dari subyek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penindasan Transpuan dalam Klasifikasi *Five Faces of Oppression*

Prillentsky dan Gonick (1996) mengatakan penindasan bisa menjadi hasil dari beberapa pilihan orang atau kebijakan yang menyebabkan tertanamnya norma, kebiasaan, dan simbol yang tidak dipertanyakan. Aturan-aturan sosial ini dapat menjadi struktur kekuatan dan penghalang yang membatasi, melumpuhkan bahkan mengurangi (secara literal maupun metaforis) beberapa kelompok orang (Harvey, 2010). Penindasan yang terjadi terhadap transpuan terjadi ketika orang atau kelompok tertentu membuat atau mengkondisikan kelompok transpuan menjadi kurang manusiawi – atau memperlakukan mereka dengan tidak manusiawi (dehumanisasi). Para transpuan tidak berkembang sepenuhnya, berarti menghambat bahasa, pendidikan, dan peluang lain yang memungkinkan mereka untuk berkembang.

Dalam sisi eksploitasi, secara khusus eksploitasi yang dimaksud Young adalah eksploitasi yang menggunakan sistem sebagai alat penindas yang melanggengkan adanya perbedaan kelas. Transpuan yang merupakan golongan kelompok masyarakat rentan tentunya sangat kesulitan dalam bertahan hidup. Akses pendidikan rendah membuat mereka sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ketika mempunyai kesempatan di pekerjaan formal, mereka seringkali mendapatkan deskriminasi dan dianggap sebelah mata. Hal tersebut yang menjadikan transpuan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Belum lagi hukum yang mengatur pekerja di Indonesia (PERPPU Cipta Kerja No. 2 Tahun 2022) banyak disoroti dan ditolak oleh rakyat karena dinilai cacat dan hanya menguntungkan para oligarki, bukan para pekerja. Adanya peraturan tersebut menjadi relevan dengan pemikiran Young terhadap konsep eksploitasi, yaitu ditunjukkan dengan adanya tindakan menggunakan tenaga manusia untuk menghasilkan keuntungan tanpa memberi kompensasi yang adil kepada mereka.

Persoalan tersebut membuat transpuan mempunyai masalah yang menumpuk dan tidak jarang memaksa mereka untuk memilih pekerjaan bidang informal, seperti membuka salon, menjadi seniman jalanan, dan juga tak jarang menjadi pekerja seks komersil. Secara ekonomi, berdasarkan data Swara, komunitas waria muda di Jakarta tidak memiliki pendapatan tetap dengan rata-rata penghasilan Rp 500.000 – Rp 1.000.000 per bulan (94,2 persen). Sebagian besar dari mereka (96,4 persen) tinggal sendiri (kontrakan dan kosan) dan sisanya tinggal dengan keluarga.

Gambar 3. Anggota Transpuan dari Salon Sanggar Swara



Sumber: Instagram Sanggar Swara (2022)

Negara yang seharusnya hadir untuk memenuhi hak-hak warga negaranya justru menjadi aktor yang melanggengkan sistem eksploitasi itu sendiri. Oleh karena itu, eksploitasi menciptakan sistem yang melanggengkan perbedaan kelas, membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin (Marx, 1904).

Selanjutnya dalam konsep marjinalisasi, para transpuan seringkali diasingkan atau dibatasi ke status sosial yang lebih rendah atau dipinggirkan dari masyarakat. Menurut Young (2014), dalam beberapa kasus, marjinalisasi lebih buruk daripada eksploitasi karena masyarakat telah memutuskan bahwa mereka tidak dapat atau tidak akan memanfaatkan orang-orang yang tidak dianggap keberadaannya ini untuk menjadi tenaga kerja. Kelompok transpuan sangat sulit untuk mengakses fasilitas publik ataupun akses tempat tinggal karena mereka dianggap sebagai sampah masyarakat yang berdosa. Berdasarkan survei data dari BBC dalam Salim (2020) yang telah dilakukan sebanyak 3 kali pada Maret 2016 dan Desember 2017 oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) dari BBC News Indonesia terkait konflik publik mengenai LGBT di Indonesia, kelompok LGBT dianggap sebagai ancaman meningkat oleh masyarakat. Hasil survei pada periode terakhir ialah sekitar 46,2% responden berpendapat bahwa LGBT cukup mengancam, sementara 41,4% lainnya menganggap sangat mengancam. Bahkan 41,1% responden dari kategori lainnya menilai bahwa kelompok LGBT tidak berhak untuk tinggal di Indonesia.

Akses Kesehatan sangat sulit didapatkan oleh para transpuan dan ketika mereka mampu mendapatkan akses tersebut pun harus mengalami deskriminasi. Salah satu anggota Sanggar Swara, Zara Fauziah, mengetahui bahwa dia hidup dengan HIV pada tahun 2017, tetapi selama empat tahun ia mengatasi diagnosisnya sendiri. Rumah sakit

tempat dia bisa menerima perawatan tidak ramah. Anggota Sanggar Swara lainnya, Rere Agistya turut mengungkapkan keresahannya tentang mendapatkan ceramah ketika mencoba mendapatkan pengobatan.

“Kalau kami datang untuk mendapatkan pelayanan atau untuk memeriksakan HIV, kami sering mendapat ceramah dengan tujuan untuk ‘menyembuhkan’ kami. Sebagian besar mereka menyalahkan aktivitas kami: ‘Ya, kanda tahu kamu laki-laki. Kenapa kamu ingin menjadi seorang perempuan?’”

Dokter dan peneliti transgender Indonesia, Dr. Alegra Wolter juga menjelaskan bahwa, banyak transpuan saat ini tidak meninggal karena HIV. Mereka meninggal karena stigma dan diskriminasi seputar kesehatan fisik dan mental mereka dan terkadang seputar seksualitas mereka serta faktor sosiodemografi lainnya. Beliau banyak melihat dan mengenal orang trans yang menghentikan pengobatan HIV karena mereka tidak mendapatkan layanan kesehatan mental yang tepat.

Pada poin powerlessness, kelompok penguasa mendominasi kelompok yang tidak berdaya dan menempatkan mereka untuk sekadar menerima perintah (Handaya, 2008). Transpuan dan ketidakberdayaan adalah sesuatu yang sulit dilepaskan dan menjadi hambatan untuk mengembangkan kapasitas mereka karena kurangnya kekuatan pengambilan keputusan. Kelompok transpuan kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, walaupun bersuara maka suara mereka dianggap tidak signifikan karena belum dianggap sebagai bagian dari masyarakat. Maka dari itu, Sanggar Swara banyak memanfaatkan momentum bersama kelompok masyarakat rentan lainnya untuk bersama-sama menuntut haknya sebagai warga negara.

Selanjutnya adalah culture imperialism yang melibatkan praktik budaya kelas dominan dan menetapkannya sebagai norma. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat mengendalikan bagaimana orang-orang di masyarakat itu menafsirkan dan berkomunikasi. Di seluruh negara, gender dan seksualitas adalah contoh umum imperialisme budaya. Dalam identitas gender telah dijelaskan bahwa yang diakui sebagai gender adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak bertingkah laku sesuai kategori gender dianggap penyimpang. Dua model pembagian dalam seks dan gender menurut Butler menjadikan gender merupakan konsekuensi dari seks dimana laki-laki haruslah maskulin dan perempuan haruslah feminin. Hal ini untuk mudah mengidentifikasi seks mereka (Sanger, 2010:89)

Dalam konteks lokal Indonesia transgender dan transeksual lebih dikenal dengan istilah waria yang memiliki kepanjangan wanita-pria. Individu yang dikategorikan sebagai transgender, transeksual, dan cis gender didefinisikan sebagai berikut:

Tabel 1. Definisi Kategori Transgender, Transeksual, dan Cisgender

<i>Transgender</i>	<i>Transeksual</i>	<i>Cis Gender</i>
1. Individu yang tidak berpenampilan sama dengan peranan <i>gender</i>	1. individu yang secara hormonal atau pembedahan melakukan ‘perubahan’ pada alat	1. Individu yang identitas gender dan ekspresi gendernya cocok dengan

yang telah diterima sejak lahir (Bettcher, 2007)	kelamin dan tubuhnya (Bettcher, 2007) 2. Secara sederhana merujuk pada individu yang mengalami <i>genderdysphoria</i> atau terperangkap pada tubuh yang salah (Garland, 2009:74).	jenis kelamin lahiriahnya (Jobe,2013).
--	--	--

Pada orang-orang yang dianggap tidak berkonformitas berdasar jenis kelaminnya atau *cis gender* ini munculah prasangka dan *stereotype* yang akhirnya dilekatkan pada komunitas atau kelompok mereka. Seringkali Sanggar Swara dalam kampanyenya mempunyai slogan *Break the CIStem*.

Terakhir adalah bentuk penindasan yang paling jelas dan terlihat yaitu, kekerasan atau violence. Kelompok transpuan sangat rentan hidup dengan pengetahuan bahwa mereka harus takut akan serangan tanpa alasan terhadap orang atau properti mereka. Tamara Lois selaku penguru Sanggar Swara membagikan pengalamannya kepada penulis tentang teman transpuannya yang pernah diperlakukan tidak lazim.

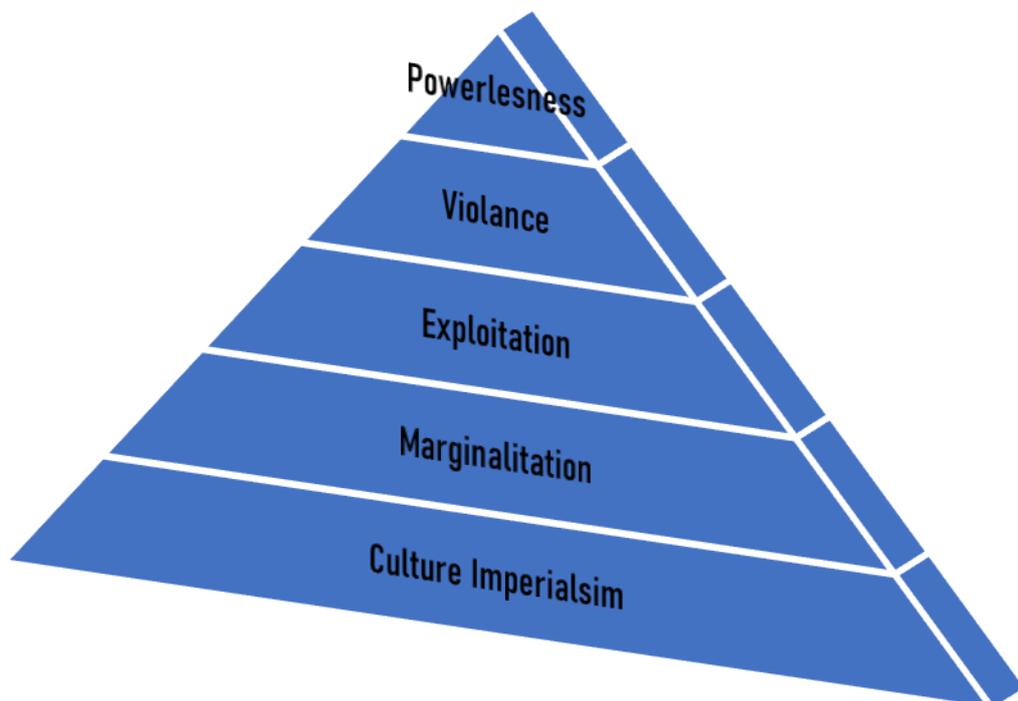
“Aku melihat perlakuan-perlakuan orang tidak dikenal itu sangat kejam, ya. Setiap malam itu kadang mereka melempar batu, siram air kencing, lempar sampah, dan lain sebagainya. Bahkan terakhir yang benar-benar saya lihat itu, korban pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tamu kepada si transpuan teman saya sendiri”.

Pernyataan di atas semakin memperkuat analisis Young terhadap konsep violence yaitu, serangan-serangan pada kekerasan tersebut tidak selalu membutuhkan motif, melainkan dimaksudkan untuk merusak, mempermalukan, atau menghancurkan orang tersebut. Semua bentuk kekerasan seksual dan kekejian rasial adalah contoh umum penindasan dengan kekerasan.

Melihat Akar Permasalahan dari Penindasan Terhadap Transpuan

Dalam sub-bab sebelumnya, penulis sudah mengklasifikasikan penindasan yang dialami oleh kelompok transpuan dengan teori five faces of oppression milik Young. Penindasan yang tengah dialami oleh kelompok transpuan bisa digambarkan layaknya fenomena gunung es. Penindasan yang terlihat hanya tampak permukaan saja, sedangkan dalamnya penindasan yang lain sulit untuk terlihat. Yang terlihat di puncak hanyalah bagaimana para transpuan diperlihatkan sebagai individu yang tidak berdaya.

Gambar 4. Tingkatan Penindasan pada Transpuan



Transpuan dan ketidakberdayaan adalah sesuatu yang sulit dilepaskan dan menjadi hambatan untuk mengembangkan kapasitas mereka karena kurangnya kekuatan pengambilan keputusan. Beberapa ketidakadilan mendasar yang terkait dengan ketidakberdayaan adalah hambatan untuk mengembangkan kapasitas seseorang karena kurangnya kekuatan pengambilan keputusan. Mereka kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, walaupun bersuara maka suara mereka dianggap tidak signifikan.

Hal tersebut membuat masyarakat di lingkungan sosial meremehkan permasalahan yang dialami para transpuan, sejalan dengan prasangka yang mengakar bahwa permasalahan transpuan bisa diselesaikan dengan cara “disembuhkan” baik secara medis ataupun secara spiritual. Indonesia merupakan negara yang masih kental dengan ajaran agama, moral, dan etika yang telah berkembang dan mengakar di seluruh lapisan

masyarakatnya. Namun penulis menyadari bahwa munculnya fenomena kelompok transpuan yang dianggap “menyimpang” tentu tidak bisa diterima begitu saja di dalam masyarakat, karena selalu ada alasan- alasan mendasar dari masyarakat untuk menolak fenomena yang dianggap menyimpang tersebut, baik itu didasari atas ajaran agama maupun budaya.

Meskipun tidak semua masyarakat menolak, sikap “diskriminasi” yang dirasakan oleh kelompok transpuan tentunya juga dianggap sebagai pelanggaran HAM. Karena kaum transpuan hidup hampir di setiap bagian belahan dunia, mereka adalah bagian dari anggota masyarakat, etnis, dan agama tertentu. Mereka juga adalah manusia yang harus dihormati haknya. Sejalan dengan pemikiran Young tentang culture imperialism, dimana melibatkan praktik budaya kelas dominan dan menetapkannya sebagai norma. Kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan dalam masyarakat mengendalikan bagaimana orang-orang di masyarakat itu menafsirkan dan berkomunikasi. Di seluruh negara, gender dan seksualitas merupakan sebuah konstruksi yang dibangun oleh masyarakat, dan mampu menjadi contoh umum dari imperialisme budaya. Dalam identitas gender telah dijelaskan bahwa yang diakui sebagai gender adalah laki-laki dan perempuan. Hal ini menyebabkan mereka yang tidak bertingkah laku sesuai kategori gender dianggap penyimpang. *Culture imperialism* menjadi bagian dasar dari fenomena gunung es karena masih banyaknya masyarakat yang belum mampu menyelami dasar permasalahan, termasuk negara sebagai aktor yang mempunyai peran penting menangani persoalan HAM yang ada. Negara justru menjadi peran yang ikut serta melanggengkan dominasi dan penindasan yang dialami oleh para kelompok transpuan serta kelompok marginal lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah penulis lakukan, penulis mampu memaknainya sebagai suatu fenomena yang jarang sekali diangkat dan dibicarakan di ruang publik. Padahal kelompok transpuan menuntut hak yang sama sebagaimana warga negara, seperti hak akan pendidikan, jaminan pekerjaan, kesehatan, serta hak untuk mengakses fasilitas publik yang sudah dijamin oleh institusi. Penulis mampu memaknai penindasan yang dibicarakan oleh Young sebagai refleksi terhadap situasi negara hari ini yang memperlihatkan wajah anti rakyat dan anti demokrasi melalui peraturan-peraturan yang hanya menguntungkan segelintir golongan yang melanggengkan rantai ketidakadilan yang dilahirkan oleh sistem yang tidak demokratis.

REFERENSI

Adhi, S.; Irawan et al. n.d. *Iktibar jurnalisme warga bagi komunitas waria di Yogyakarta*.

- Ackelsberg, Martha. "Reflections on Iris Marion Young's Justice and the Politics of Difference", *Politics and Gender* 4, no. 2, (2008), <https://www.researchgate.net/publication/248650384>.
- Arikunto, Suharsimi, (2003). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badgett, M., Nezhad, S., Waaldjik, C., & Rodgers, Y. (2014). *The Relationship between LGBT Inclusion and Economic Development. In Proceedings of An Analysis of Emerging Economies*, 1-7.
- Bungin, B. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi ke Arah Ragam Varian Kontemporer)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Etikan, Ilker. 2016. *Comparisono of Convenienccee Sampling and Purposivee Sampling. Americann Journal of Theoretical and Applied Statistics*.
- Farida, U. (2019). *Pertarungan Diksi dalam Wacana Lesbian, Gay, BiseksuaL, dan Transgender (LGBT)*.
- Halim, S., & Liang, J. (2013). *Hidup Sebagai LGBT di Asia: Laporan Nasional Indonesia. Tinjauan dan Analisa Partisipatif tentang Lingkungan Hukum dan Sosial bagi Orang dan Masyarakat Madani Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)*.
- Harvey, J. (2000). *Social privilege and moral subordination. Journal of Social Philosophy*, 31, 177–188
- Hasbiansyah, O. (2008). Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(1), 163–180. <https://doi.org/10.29313/mediator.v9i1.1146>
- Hegarty, B. (2018). *Under the Lights, Onto the Stage Becoming Waria through National Glamour in New Order Indonesia*. Vol.5.
- Heldke, L., & O'Connor, P. (2004). *Five faces of oppression*. Dalam L. Heldke dan P. O'Connor (Eds.), *Oppression, privilege, & resistance*. Boston: McGraw Hill.
- Informatika, K. (2020). *Lesbi , Gay , Biseksual , dan Transgender dalam Bingkai Kajian Media dan Komunikasi : Sebuah Kajian Literatur Sistematis Lesbian , Gay , Bisexual , and Transgender in the Framing of Media and Communication Studies : a Systematic Literature Review*. 2(2), 176–185. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.64>
- Issues, I. N. C. on L. (2014). *Alternative report of Indonesia's ICCPR State report 2013*.

- Jakarta, M. D. I., Dan, D., & Pengantar, K. (2015). *STATUS GENDER DAN PERSAMAAN HAK ASASI*.
- Kuypers, Jim A. & Andrew King. “*What is Rhetoric?*”, in *Rhetorical Criticism: Perspectives in Action*, edited by Jim A. Kuypers. Lanham : Lexington Books, 2009.
- Koeswinarno. (2004). *Hidup Sebagai Waria*. Lkis.
- Laku, S. K. (2021). *Ketika Demokrasi Membutuhkan Inklusi*. *Dekonstruksi*, 4(01), 156–184. <https://doi.org/10.54154/dekonstruksi.v4i01.70>
- Manen, M, V. “Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy”. Routledge Taylor & Francis Group, 2017.
- Mayo, Marjorie. “*Exclusion, Inclusion and Empowerment: Community Empowerment? Reflecting on the Lessons of Strategies to Promote Empowerment*”, in *The Politics of Inclusion and Empowerment; Gender, Class and Citizenship*, edited by John Andersen and Birte Siim. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2004.
- Muhtmainnah, Y. (2016). *LGBT Human Rights in Indonesian Policies*. *Indonesian Feminist Journal*, 13-22.
- Polletta, Franscesca. *It Was Like A Fever: Storytelling In Protest and Politics*. Chicago & London : The University of Chicago Press, 2006.
- Prilleltensky, I., & Gonick, L. (1996). *Politics change, oppression remains: On the psychology and politics of oppression*. *Political Psychology*, 17, 127–147
- Raco, J. (2010). *Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya*. PT GRASINDO (Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Rumata, V. M. (2019). *Lesbi, Gay, Biseksual, dan Transgender dalam Bingkai Kajian Media dan Komunikasi: Sebuah Kajian Literatur Sistematis*. Vol. 2 No. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i2.64>
- Roberts, E. 2001. *Lesbian , gay , bisexual , and transgendered youth issues*. SIECUS Report, 29(April/May), 37–42.
- Sanggar Swara. (2020). *Jalan Panjang untuk Penerimaan. Analisis Situasi Perempuan di Indonesia*.
- Subhrajit, C. (2014). *Problems Faced by LGBT People in the Mainstream Society: Some Recommendations*. *International Journal of Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies (UIMS)*, 317-331

- Sudikin, B. (2002). *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded Theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*. Surabaya, Insan Cendikia.
- Thahara, K. A., & Hadiwono, A. (2022). *Chroma Trans-Puan : Ruang Komunitas Dan Refleksi Diri*. Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa), 4(1), 391. <https://doi.org/10.24912/stupa.v4i1.16934>
- Young, I. M. (2002). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.